



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: SEK-10.OT.03.02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2023**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.1-OT.03.02-30 tanggal 29 Mei 2023 hal Penyampaian daftar 114 (seratus empat belas) Satuan Kerja hasil Panel TPI atas Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yang akan diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, satuan kerja yang berdasarkan hasil panel Tim Penilaian Internal memenuhi syarat menjadi satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan selanjutnya diusulkan kepada Tim Penilai Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 567);
7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 Untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.
9. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/ Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN USULAN SATUAN KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan usulan satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Usulan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2023  
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

Lampiran  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nomor : SEK-10.OT.03.02 Tahun 2023  
Tanggal : 31 Mei 2023

**Rekapitulasi 114 Usulan Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM  
Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023  
Yang Memenuhi Syarat Diusulkan Ke TPN**

**A. 40 Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBBM**

<b>NO</b>	<b>Nama Satuan Kerja</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kantor Wilayah D.I Yogyakarta	Unit Kantor Wilayah
2.	Kantor Wilayah Bangka Belitung	Unit Kantor Wilayah
3.	Kantor Wilayah DKI Jakarta	Unit Kantor Wilayah
4.	Kantor Wilayah Jawa Barat	Unit Kantor Wilayah
5.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	Unit Kantor Wilayah
6.	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	Unit Kantor Wilayah
7.	Kantor Wilayah NTB	Unit Kantor Wilayah
8.	Kantor Wilayah Bali	Unit Kantor Wilayah
9.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	Unit Kantor Wilayah
10.	Kantor Wilayah Riau	Unit Kantor Wilayah
11.	Lapas Kelas I Palembang	Unit Pemasyarakatan
12.	Lapas Kelas IIA Mataram	Unit Pemasyarakatan
13.	Lapas Kelas IIA Watampone	Unit Pemasyarakatan
14.	Lapas Kelas IIB Wonosari	Unit Pemasyarakatan
15.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	Unit Pemasyarakatan
16.	Lapas Kelas IIB Brebes	Unit Pemasyarakatan
17.	Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang	Unit Pemasyarakatan
18.	LPKA Kelas I Palembang	Unit Pemasyarakatan
19.	LPKA Kelas I Kutoarjo	Unit Pemasyarakatan
20.	LPKA Kelas II Gorontalo	Unit Pemasyarakatan
21.	Bapas Kelas II Magelang	Unit Pemasyarakatan
22.	Bapas Kelas II Karangasem	Unit Pemasyarakatan
23.	Bapas Kelas II Pati	Unit Pemasyarakatan
24.	Bapas Kelas II Pangkalan Bun	Unit Pemasyarakatan
25.	Rupbasan Kelas I Palangkaraya	Unit Pemasyarakatan
26.	Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Unit Imigrasi
27.	Kanim Kelas I TPI Surakarta	Unit Imigrasi
28.	Kanim Kelas I TPI Malang	Unit Imigrasi
29.	Kanim Kelas I TPI Cilacap	Unit Imigrasi
30.	Kanim Kelas I TPI Yogyakarta	Unit Imigrasi
31.	Kanim Kelas I TPI Balikpapan	Unit Imigrasi
32.	Kanim Kelas I TPI Semarang	Unit Imigrasi
33.	Kanim Kelas I TPI Pekanbaru	Unit Imigrasi
34.	Kanim Kelas I Non TPI Pematang	Unit Imigrasi
35.	Kanim Kelas II TPI Pare- Pare	Unit Imigrasi
36.	Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo	Unit Imigrasi

NO	Nama Satuan Kerja	Keterangan
37.	Kanim Kelas II Non TPI Wonosobo	Unit Imigrasi
38.	Kanim Kelas II Non TPI Madiun	Unit Imigrasi
39.	Rudenim Semarang	Unit Imigrasi
40.	Badiklat Jawa Tengah	Unit BPSDM

#### B. 74 Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK

NO	Nama Satuan Kerja	Keterangan
1.	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	Unit Eselon I
2.	Ditjen Hak Asasi Manusia	Unit Eselon I
3.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	Unit Kantor Wilayah
4.	Kantor Wilayah Jambi	Unit Kantor Wilayah
5.	Kantor Wilayah Banten	Unit Kantor Wilayah
6.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	Unit Kantor Wilayah
7.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	Unit Kantor Wilayah
8.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	Unit Kantor Wilayah
9.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	Unit Kantor Wilayah
10.	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	Unit Kantor Wilayah
11.	Kantor Wilayah Maluku	Unit Kantor Wilayah
12.	Lapas Kelas I Madiun	Unit Masyarakat
13.	Lapas Kelas IIA Magelang	Unit Masyarakat
14.	Lapas Kelas IIA Kuningan	Unit Masyarakat
15.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	Unit Masyarakat
16.	Lapas Kelas IIA Palopo	Unit Masyarakat
17.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	Unit Masyarakat
18.	Lapas Kelas IIA Bulukumba	Unit Masyarakat
19.	Lapas Kelas IIA Parepare	Unit Masyarakat
20.	Lapas Kelas IIA Padang	Unit Masyarakat
21.	Lapas Kelas IIB Payakumbuh	Unit Masyarakat
22.	Lapas Kelas IIB Polewali	Unit Masyarakat
23.	Lapas Kelas IIB Sumedang	Unit Masyarakat
24.	Lapas Kelas II B Boalemo	Unit Masyarakat
25.	Lapas Kelas IIB Banyuwangi	Unit Masyarakat
26.	Lapas Kelas IIB Slawi	Unit Masyarakat
27.	Lapas Kelas IIB Sekayu	Unit Masyarakat
28.	Lapas Kelas IIB Amuntai	Unit Masyarakat
29.	Lapas Kelas IIB Martapura	Unit Masyarakat
30.	Lapas Kelas III Rangkasbitung	Unit Masyarakat
31.	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	Unit Masyarakat
32.	Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Unit Masyarakat
33.	Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa	Unit Masyarakat
34.	Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto	Unit Masyarakat
35.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	Unit Masyarakat
36.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung	Unit Masyarakat
37.	Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	Unit Masyarakat
38.	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	Unit Masyarakat

NO	Nama Satuan Kerja	Keterangan
39.	Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun	Unit Pemasyarakatan
40.	Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman	Unit Pemasyarakatan
41.	LPKA Kelas II Lombok Tengah	Unit Pemasyarakatan
42.	LPKA Kelas IIB Tanjung Pati	Unit Pemasyarakatan
43.	Rutan Kelas I Depok	Unit Pemasyarakatan
44.	Rutan Kelas IIB Garut	Unit Pemasyarakatan
45.	Rutan Kelas IIB Barru	Unit Pemasyarakatan
46.	Rutan Kelas IIB Salatiga	Unit Pemasyarakatan
47.	Rutan Kelas IIB Banda Aceh	Unit Pemasyarakatan
48.	Rutan Kelas IIB Magetan	Unit Pemasyarakatan
49.	Rutan Kelas IIB Sengkang	Unit Pemasyarakatan
50.	Rutan Kelas IIB Bantaeng	Unit Pemasyarakatan
51.	Rutan Kelas IIB Tamiang Layang	Unit Pemasyarakatan
52.	Rutan Kelas IIB Ternate	Unit Pemasyarakatan
53.	Rutan Kelas IIB Pacitan	Unit Pemasyarakatan
54.	Rutan Kelas IIB Pemalang	Unit Pemasyarakatan
55.	Bapas Kelas II Mataram	Unit Pemasyarakatan
56.	Bapas Kelas II Purwokerto	Unit Pemasyarakatan
57.	Bapas Kelas II Kediri	Unit Pemasyarakatan
58.	Bapas Kelas II Bau Bau	Unit Pemasyarakatan
59.	Bapas Kelas II Pekalongan	Unit Pemasyarakatan
60.	Bapas Kelas II Klaten	Unit Pemasyarakatan
61.	Bapas Kelas II Nusakambangan	Unit Pemasyarakatan
62.	Bapas Kelas II Sampit	Unit Pemasyarakatan
63.	Rupbasan Kelas I Jayapura	Unit Pemasyarakatan
64.	Rupbasan Kelas I Surakarta	Unit Pemasyarakatan
65.	Rupbasan Kelas II Cilacap	Unit Pemasyarakatan
66.	Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung	Unit Imigrasi
67.	Kanim Kelas I TPI Padang	Unit Imigrasi
68.	Kanim Kelas II TPI Sabang	Unit Imigrasi
69.	Kanim Kelas II TPI Langsa	Unit Imigrasi
70.	Kanim Kelas II TPI Nunukan	Unit Imigrasi
71.	Kanim Kelas II Non TPI Agam	Unit Imigrasi
72.	Kanim Kelas II Non TPI Ketapang	Unit Imigrasi
73.	Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar	Unit Imigrasi
74.	Rudenim Balikpapan	Unit Imigrasi

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2023  
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SEKRETARIS JENDERAL,



  
KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.